

# Analisis Potensi Investasi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Halmahera Selatan

Nonce Hasan<sup>1</sup>, Aswir Hadi<sup>1</sup>, Dewi Permatasari<sup>1</sup>, Yetty<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ekonomi Pembangunan\_Fakultas Ekonomi dan isnis, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

\*) Corresponding Author: nohasan2017@gmail.com

**Abstract.** The process of economic development in South Halmahera always involves production activities in the form of goods and services in all economic sectors. Recently, since the onset of the COVID-19 pandemic, South Halmahera must have a breakthrough in overcoming the difficulties of declining economic growth. Local governments must make efforts in such a way as to attract investment to the regions through policies to drive investment to boost economic growth, which is outlined in a blueprint for regional investment potential, and is expected to be able to generate multiplier effects and benefits in the form of direct investments such as capital transformation, job creation, transfers. technology, access to global markets, and managerial capabilities. South Halmahera Regency is rich in natural resources and if managed properly it is believed to be able to attract investors to invest. The largest natural resource potentials are mining, fisheries and marine, tourism and agro-complex. All of these potentials have the opportunity to develop through cooperation in trade and industry. Another interesting sector is small island clusters for tourism development. The results of this study are intended to serve as a contextual basis that becomes a guideline for stakeholders in an effort to attract investment in a planned, directed, integrated and sustainable manner based on the directions and policies of National and Regional Development. As investment guidelines, the direction of the work plan in the preparation of tourism sector investment development is expected to function optimally. Referring to this context, the problem in research is how much potential investment in the tourism sector can be relied on to increase regional economic growth.

**Keywords:** Potential, Tourism, South Halmahera

## 1. Pendahuluan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan adalah menaikkan tingkat kesejahteraan hidup rakyat, lapangan kerja semakin terbuka, dan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui optimalisasi sektor-sektor potensial daerah. Arah kebijakan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan terpenting pada prinsipnya bahwa dalam pengelolaan potensi-potensi lokal harus mampu membawa kemajuan dan perubahan bagi ekonomi daerah lewat investasi baru.

Proses pembangunan ekonomi di Halmahera Selatan diusahakan untuk bisa melibatkan usaha-usaha yang produktif baik berupa barang maupun jasa di setiap sektor ekonomi. Dalam kerangka demikian maka untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun konektivitas antar sektor dalam memfasilitas dunia usaha. Dunia usaha, terutama di bidang investasi (penanaman modal) sebagai faktor pendorong utama perekonomian daerah.

Investasi akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal apabila didukung oleh kondisi-kondisi yang tersedia juga baik. Faktor-faktor pendukung baik faktor ekonomis maupun non ekonomis yaitu politik yang stabil, infrastruktur baik, sarana dan prasarana fisik serta unsur pendukung lainnya saling terkait dan berdampak terhadap perkembangan investasi daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Belakangan ini sejak terjadinya pandemi covid-19, Halmahera Selatan harus memiliki suatu terobosan dalam mengatasi kesulitan pertumbuhan ekonomi yang merosot. Pemerintah daerah harus berupaya sedemikian rupa guna menarik investasi ke daerah melalui kebijakan menggerakkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dituangkan ke dalam suatu blue print potensi investasi daerah, dan diharapkan mampu menimbulkan *multiplier effect* serta manfaat dalam bentuk *direct investment* seperti, pembukaan lapangan kerja baru, transfer teknologi, jaringan ke pasar global, dan penambahan modal.

Penelitian ini mempunyai tujuan utama dalam memberikan rencana pengembangan peningkatan investasi melalui berbagai upaya memperkenalkan baik lewat iklan, ataupun publisitas dalam perluasan kerjasama regional, nasional serta global. Upaya pengembangan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai daerah usaha melalui kegiatan perdagangan, industri dan pariwisata berskala nasional dan global, maka pengetahuan yang lebih mendalam menjadi bagian yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah menjadi usaha pengembangan investasi.

Mewujudkan Halmahera Selatan sebagai daerah bisnis, dibutuhkan suatu *Grand Strategy* investasi melalui perencanaan dan indikator program tahunan, serta pengembangan pelayanan terhadap masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan, maka diperlukan suatu dokumen bagi pemerintah dalam merencanakan program investasi tahunan yang didukung dengan *Grand Strategy* Investasi Kabupaten Halmahera Selatan yang telah ada sebelumnya..

## II. Tinjauan Teori

### a) Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai perbandingan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu Negara adalah melalui pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi adalah usaha dalam perekonomian yang mengalami tahap transformasi sehingga terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dalam masyarakat, atau bisa diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan batas kemungkinan produksi (*production possibility frontier = PPF*) suatu negara (Samuelson,1996).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) pertumbuhan ekonomi adalah representasi, perluasan GDP potensial atau output nasional Negara. Dengan kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan terjadinya penambahan pendapatan nasional suatu Negara pada kurun waktu tertentu atau periode tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah produk yang diciptakan oleh suatu daerah-daerah lain dalam negara tertentu. Menurut Sukirno (2008) pertumbuhan ekonomi adalah transformasi dalam perekonomian yang berdampak pada kemakmuran sebagai akibat dari pertambahan produksi barang dan jasa. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari kemajuan suatu perekonomian.

### b) Konsep Pengembangan Wilayah

Glasson (1990) memandang wilayah perencanaan sebagai suatu daerah yang memiliki wilayah perencanaan yang luas dalam pengambilan keputusan-keputusan investasi berskala ekonomi, tersedianya tenaga kerja yang cukup, memiliki struktur ekonomi yang homogen, serta memiliki paling sedikit satu titik pertumbuhan (*growth point*) dan mempunyai solusi dalam menghadapi setiap permasalahan. Sehingga sebuah wilayah perencanaan memiliki desain khusus dalam upaya pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan.

Pengembangan wilayah dengan konsep "*growth pole*" menyarankan bahwa, dengan investasi secara besar-besaran oleh industri-industri padat modal di kota-kota besar akan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kegiatan-kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Oleh sebab itu perlu diikuti dengan kebijakan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, kelembagaan sosial, ekonomi transportasi dan telekomunikasi (Juoro dan Syaikhun, 1997).

Gambaran potensi sumber daya wilayah terdiri dari sekumpulan data dengan berbagai macam tema yaitu, fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan infrastruktur yang menggambarkan kondisi Kabupaten Halmahera Selatan, diolah dalam bentuk informasi yang merepresentasikan pembangunan daerah. Informasi tentang karakteristik sumber daya dan pembangunan di daerah sangat penting bagi para pihak terkait dalam upaya pemanfaatan potensi sesuai amanat undang-undang. Selain itu, informasi sumber daya tersebut bertujuan untuk memudahkan para pihak menganalisis potensi yang dimiliki daerah sesuai dengan tujuan dan kebutuhan, termasuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pihak-pihak yang berkeinginan mengenal daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

### c) Konsep Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan pemanfaatan alam secara alami yang mana dalam pengelolannya masyarakat setempat bisa memperoleh tambahan pendapatan dari kegiatan itu.

Pengertian pariwisata berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan, pariwisata merupakan usaha wisata yang mampu menyediakan *service* maupun fasilitas yang bisa disiapkan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Agar suatu daerah menjadi tujuan wisata harus memiliki daya tarik bagi wisatawan, maka ada aspek-aspek penting dalam pengembangan desa yaitu :

- a. Aspek yang bisa terlihat
- b. Aspek yang bisa dibayar
- c. Aspek yang harus dilakukan

Dari penjelasan diatas maka yang terpenting bagi suatu objek wisata agar dapat memikat dan memberikan pesona orang untuk datang berkunjung, daerah tersebut pada dasarnya harus menampilkan perbedaan tersendiri, antara lain : keunikan, keaslian, dan perilaku dari masyarakat yang berbudaya santun serta mempunyai kesempatan tumbuh baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya.(Suleman and Kahumata 2020).

#### **d) Dampak Pariwisata terhadap Perekonomian**

Pada saat membicarakan dampak pariwisata bagi masyarakat lokal atau *host community*, menurut Nurdiansah (2014) kemiskinan menjadi sorotan. Pariwisata tidak hanya melestarikan keberlangsungan sebagai bagian dari tradisi dan warisan turun temurun akan tetapi dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk terbebas secara mandiri dari kemiskinan melalui akses dan peluang ikut berperan dalam pemanfaatan industri pariwisata.

Dampak positif lain dari pariwisata sebagai berikut:

##### *1. Foreign Exchange Earnings*

Pengeluaran sektor pariwisata memberikan pengaruh positif untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat lokal dan sebagai pemicu menaikkan gairah berinvestasi dan secara tidak langsung mendorong sektor keuangan untuk tumbuh berdampingan dengan sektor ekonomi lainnya. Dengan kedatangan wisatawan asing ke sebuah daerah untuk menghabiskan waktu liburan dalam menikmati keindahan alam mengakibatkan bertumbuhnya bisnis valuta asing dalam mempermudah pelayanan bagi wisatawan selama mereka melakukan kunjungan.

##### *2. Contributions to Government Revenues*

Sumbangan pariwisata secara langsung terlihat dari kenaikan yang signifikan pada penerimaan pajak pendapatan daerah yang dipungut dari para pekerja dan usahawan pada kawasan wisata. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terlihat pajak atau bea cukai barang-barang yang diimpor semakin bertambah tiap tahun dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

##### *3. Development of Local Economies*

Melalui pengembangan sektor pariwisata diharapkan bisa menaikkan skala ekonomi lokal pada daerah wisata. Namun nilai dari penerimaan lokal sulit untuk dihitung seperti pendapatan para pekerja informal dari para sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena rata-rata jumlah pengeluaran wisatawan tidak dirincikan per item.

### **III. Data dan Metodologi**

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sistemik, Holistik, dan Integratif. Pendekatan ini melihat pembangunan sebagai sistem yang holistik dan integratif. Komponen-komponen dalam pembangunan, seperti pemukiman, sarana publik dan privat, yang memiliki hubungan erat dalam membentuk suatu sistem. Pengembangan suatu kawasan harus terangkum dalam suatu komponen holistik yang dirancang dalam system. Terkait dengan sistem, maka analisis harus diberlakukan terhadap semua aspek dalam pembangunan termasuk elemen-elemen yang bersifat kelembagaan serta pengaruh secara riil terhadap lingkungan hidup dan sosial-budaya-ekonomi.

Berdasarkan analisis dalam penelitian maka akan disusun suatu perencanaan dan pengembangan secara holistik sebagai sebuah sistem yang secara aggregate terhubung dalam rencana pengembangan daerah. Bukan hanya faktor penanamana modal sebagai solusi dalam pengembangan daerah ke depan tapi konsekuensinya adalah perlu adanya kerangka perencanaan yang terpadu serta terkoordinasi antar sektor. Berdasarkan metode dan pendekatan, maka pengumpulan data dan informasi dalam pekerjaan masterplan investasi, dilakukan untuk keperluan pemetaan sektor-sektor, potensi investasi dan persebarannya, terdiri dari data primer maupun data sekunder.

Pengolahan data merupakan kegiatan menginterpretasikan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemecahan masalah. Data yang terkumpul kemudian ditabulasi kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik/gambar. Data yang ada diolah melalui analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Pengolahan data

kuantitatif akan lebih terukur karena mempunyai parameter tertentu, sedangkan pengolahan data kualitatif lebih mengandalkan pendapat-pendapat, hasil diskusi dan pengalaman para ahli.

Sasaran analisis data difokuskan untuk menjawab tujuan dan luaran dari kegiatan ini, sehingga dapat digunakan dalam program implementasi, khususnya dalam rangka pengambilan kebijakan untuk penyusunan potensi investasi bidang pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan. Analisis yang dibutuhkan untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu:

1. Analisis Perundang-undangan;
2. Analisis deskriptif untuk melihat konsistensi antar dokumen dalam proses perencanaan;
3. Analisis kelayakan ekonomi. Analisis model Cohort, untuk menganalisis dan mengevaluasi perubahan perilaku sekelompok pelaku investasi tertentu dengan fitur demografis umum dalam periode waktu tertentu guna mendapatkan perbandingan antar pelaku investasi.

#### IV. Hasil dan Pembahasan

##### A. Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata

###### 1) Kebijakan Spasial

Kebijakan spasial kepariwisataan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan bagian integral dari kebijakan spasial kepariwisataan Nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Provinsi (RIPPARDA Provinsi) Maluku Utara.

Sesuai RIPPARNAS terdapat 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), 88 Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPP), dan 222 Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP). Dalam RIPPARNAS Provinsi Maluku Utara menetapkan Kabupaten Morotai sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSPP), sedangkan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP).

Pengembangan perwilayahan kepariwisataan Kabupaten Halmahera Selatan dimaksudkan untuk mengintegrasikan perkembangan sektor pariwisata dengan perkembangan sektor-sektor lainnya dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Isu-isu dan permasalahan pengembangan wilayah secara makro juga berpengaruh terhadap perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan.

Rencana Struktur Tata Ruang Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan dibagi menjadi 3 zonasi, meliputi beberapa Destinasi Pariwisata Daerah (DPD). Pengembangan daerah wisata harus melihat isu strategis dan potensi desa. Untuk itu harus ada pembagian zonasi berdasarkan permasalahan pengembangan kepariwisataan, yaitu :

1. **Zona Inti**, merupakan *main attraction* suatu ODTW mempunyai aktivitas utama dan dilengkapi dengan fasilitas utama.
2. **Zona Penyangga (Buffer Zone)**, berfungsi memisahkan *main attraction* aktivitas dengan fasilitas pendukung.
3. **Zona Pelayanan**, suatu daerah memiliki fasilitas pendukung diantaranya jaringan infrastruktur dasar, akses fasilitas, pelayanan pengunjung dan sebagainya.

###### b) Kebijakan Pengembangan Produk Wisata

Kebijaksanaan dalam pengembangan produk wisata, diantaranya yaitu:

1. Landasan pokok dalam pengembangan produk wisata. membutuhkan azas keserasian, keterjangkauan, keberlanjutan serta kerakyatan.
2. Aspek: perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang terintegrasi merupakan aspek penting dalam upaya pengembangan produk wisata.
3. Tugas dan wewenang pemerintah daerah adalah menyiapkan perencanaan pembangunan produk wisata dengan melihat potensi dan aspirasi baik dari pihak masyarakat maupun swasta.
4. Peranan Pemerintah Daerah adalah sebagai pelaku utama dalam mendorong dan mengendalikan usaha pariwisata. Pengelolaan dan pembangunan paket wisata harus dikelola secara bersama baik oleh masyarakat setempat, swasta dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Daerah harus mampu memberikan daya tarik wisata baik melalui wisata budaya maupun kesenian daerah yang dilaksanakan lewat event-event maupun festival daerah.
6. Pengembangan produk wisata dalam pengembangannya mampu menyatukan baik antar sektor maupun antar daerah.
7. Kabupaten Halmahera selatan harus memiliki keunikan dan keunggulan daya saing, sehingga mampu memberikan kekuatan sebagai warna identitas daerah dalam upaya pengembangan produk wisata.

### B. Rencana Pengembangan Pemasaran dan Promosi

Pengembangan pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan terutama dalam meningkatkan kunjungan dan pengeluaran wisatawan maka perlu dikembangkan konsep pemasaran sehingga mampu memberikan dampak yang positif untuk menarik wisatawan nusantara dan mancanegara khususnya Eropa Barat.

Konsep pemasaran yang bisa dikembangkan terhadap wisatawan nusantara adalah melalui promosi paket wisata berisi informasi mengenai objek wisata di Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk layanan informasi dan publikasi, harus gampang terlihat oleh para wisatawan. Diperlukan juga kerjasama dengan pihak pengelola daerah lainnya yang berdekatan dengan Kabupaten Halmahera selatan.

Promosi terpadu di bidang pariwisata sangat baik dilakukan antara Kabupaten Halmahera Selatan dengan kabupaten/kota. Berbagai upaya promosi dioptimalkan untuk menambah lama waktu berkunjung melalui satu paket wisata yang terpadu.

### C. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana

Untuk meningkatkan jangkauan objek wisata dan menambah daya tarik dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dalam memenuhi kebutuhan wisata.. Pemenuhan prasarana pariwisata diantaranya penyediaan jalan yang baik, air bersih, listrik, serta jaringan komunikasi internet. Pemenuhan kebutuhan sarana pariwisata meliputi tempat hunian berupa penginapan ataupun *homestay*, serta hotel yang layak, juga rumah makan sesuai dengan kebutuhan dan lebih mengutamakan tata letak daerah yang alamiah.

### D. Rencana Peningkatan Sumber Daya Manusia

Untuk peningkatan Sumber daya manusia pariwisata maka perlu penanganan baik dari kalangan pemerintah daerah, tenaga kerja terdiri dari usaha-usaha pariwisata serta masyarakat yang berada dilingkungan daerah wisata.

Untuk kalangan pemerintah yang menangani secara langsung pengembangan pariwisata, perlu dilakukan Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional yang bersifat penyuluhan dalam upaya peningkatan “Tingkat Sadar Wisata” dan “Citra Pariwisata”.

Untuk kalangan tenaga kerja/usaha pariwisata, melalui peningkatan kualitas pelayanan prima dari pekerja melalui kegiatan pendidikan dan Latihan, juga seminar-seminar yang bersifat penyegaran dapat menambah mutu pelayanan.

Untuk kalangan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan desa sebagai upaya menaikkan SDM masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan diharapkan agar manfaat ekonomi berdampak langsung pada masyarakat yang berada pada objek wisata tersebut.

### E. Rencana Pengaturan dan Kelembagaan

Tujuan pengaturan dan kelembagaan pariwisata di Kabupaten Halmahera Selatan adalah membuka kesempatan kerja, pendapatan daerah dan masyarakat meningkat secara signifikan, serta terwujudnya kemudahan berwisata di Kabupaten Halmahera Selatan. Sedangkan sasaran pengaturan dan kelembagaan pariwisata yaitu terciptanya iklim yang aman dan kemudahan Investasi pada Lembaga ekonomi rakyat.

Posisi Instansi/lembaga yang langsung maupun tidak langsung menangani kepariwisataan di Kabupaten Halmahera selatan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Komposisi Instansi/Lembaga Pengelola Kepariwisataan di Kabupaten Halmahera Selatan

No.	Jenis Usaha	Instansi/Lembaga	Instansi/Lembaga tidak Langsung
1.	Akomodasi	Disparbud	BAPPEDA, Bagian Perekonomian dan DISPENDA
2.	Restoran/ rumah makan	Disparbud	BAPPEDA, Bagian Perekonomian dan DISPENDA
3.	Objek dan daya tarik wisata alam	Disparbud Perhutani	Bag. Perekonomian DISPENDA
4.	Objek dan daya tarik wisata budaya	Disparbud Yayasan	
5.	Objek dan daya tarik wisata ziarah/ minat ibadah	Disparbud Kadepag Yayasan	
6.	Rekreasi & Hiburan Umum	Disparbud	DISPENDA dan Bagian Perekonomian

Sumber: Rencana, 2013

### E. Rencana Pengembangan Investasi Pariwisata

Rencana pengembangan Investasi melalui kegiatan pembangunan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pemberian wewenang yang akuntabel, terbuka dan demokratis harus mampu menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat. Peningkatan kemampuan kelembagaan sangat penting sebagai wadah penyaluran aspirasi dalam mengikutsertakan masyarakat sebagai sumberdaya lokal.

Adapun prinsip pengelolaan Investasi yang dianut adalah, akuntabel, terbuka dan demokratis diharapkan mampu menjadi magnet pada percepatan Investasi pariwisata di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pengembangan pariwisata di Kabupaten Halmahera Selatan bisa maksimal lewat prosedur kemitraan dimana pemerintah daerah bisa menjadi fasilitator sehingga orientasi pembangunan dari *top down* berubah ke *bottom up* dan partisipatif, menuju pemerintahan yang baik (*good governance*) dan demokratis.

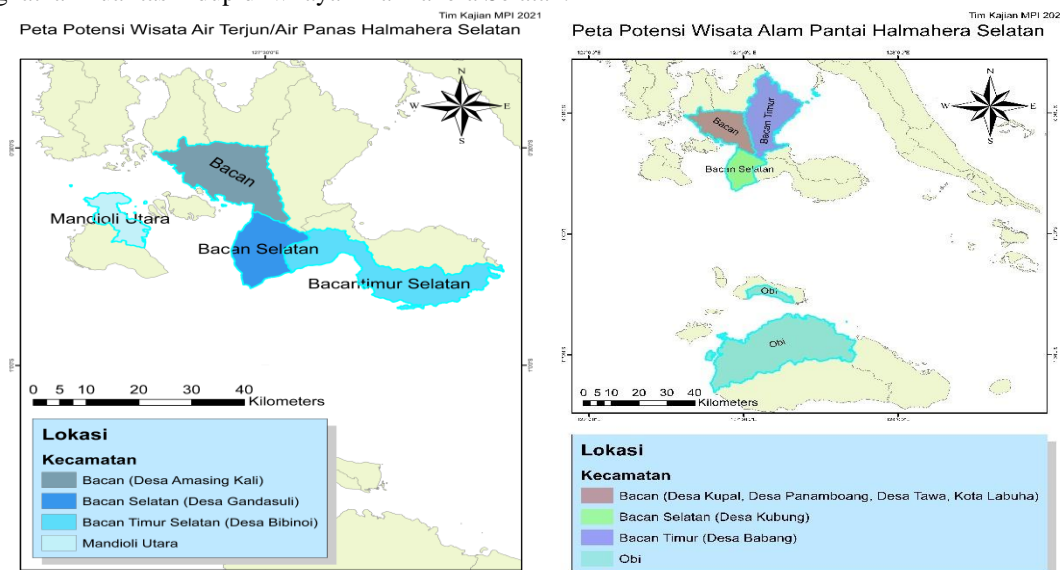
### F. Pengembangan Investasi Agrotourism: Performa Bisnis & Faktor Pemberdayaan

Investasi *agrotourism* merupakan segmen industri pariwisata yang dapat berkembang, apabila mampu mengatur sektor pertanian menuju pertanian multifungsi dalam upaya mencapai kesejahteraan petani maupun pelaku pertanian.

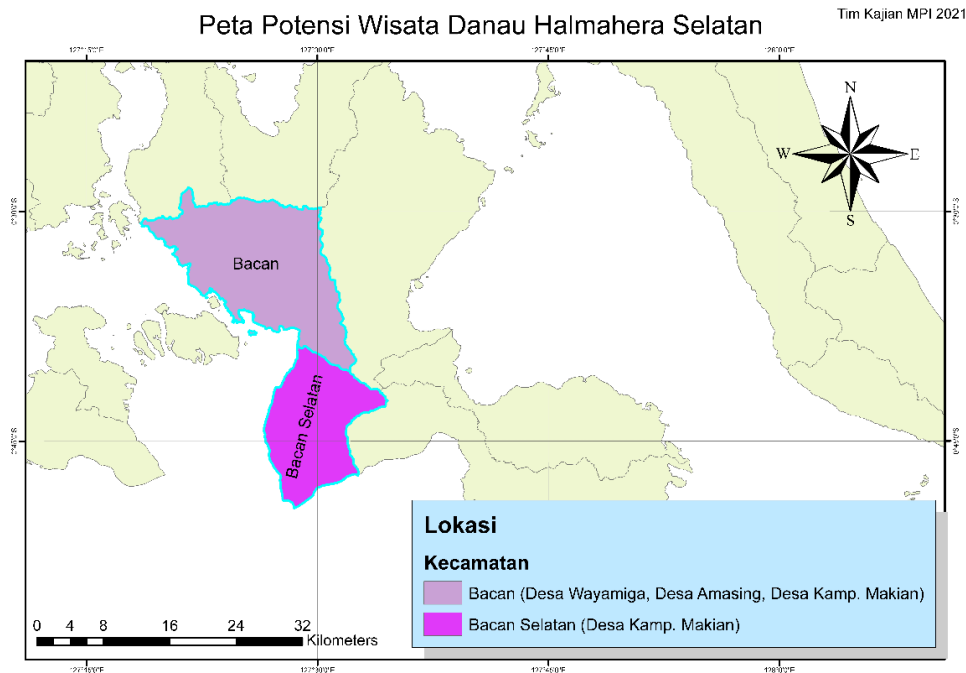
Kebijakan pembangunan pertanian identik dengan pembangunan pedesaan dimana secara struktural memungkinkan petani memanfaatkan struktur pertanian yang dikombinasikan dengan akomodasi wisata, merupakan upaya untuk menarik kunjungan wisatawan ke wilayah pertanian. Motivasi pengembangan *agrotourism* adalah sosial dan ekonomi. *Agrotourism* memberikan manfaat ekonomi cukup representative dan bervariasi tergantung dari kemampuan investasi pada lahan pertanian.

Sektor pariwisata di sisi lain pada beberapa daerah lain berkembang sebagai penyumbang pendapatan ke daerah. *International Ecotourism Society* menyatakan bahwa Indonesia telah diidentifikasi sebagai negara yang prospektif untuk mengembangkan pariwisata khususnya ekowisata. Potensi keanekaragaman pertanian secara luas yaitu tanaman, ternak, perikanan, satwa liar flora dan fauna serta budaya masyarakat, pantai pasir hitam maupun putih, pemandangan alam, lautan, hingga pegunungan.

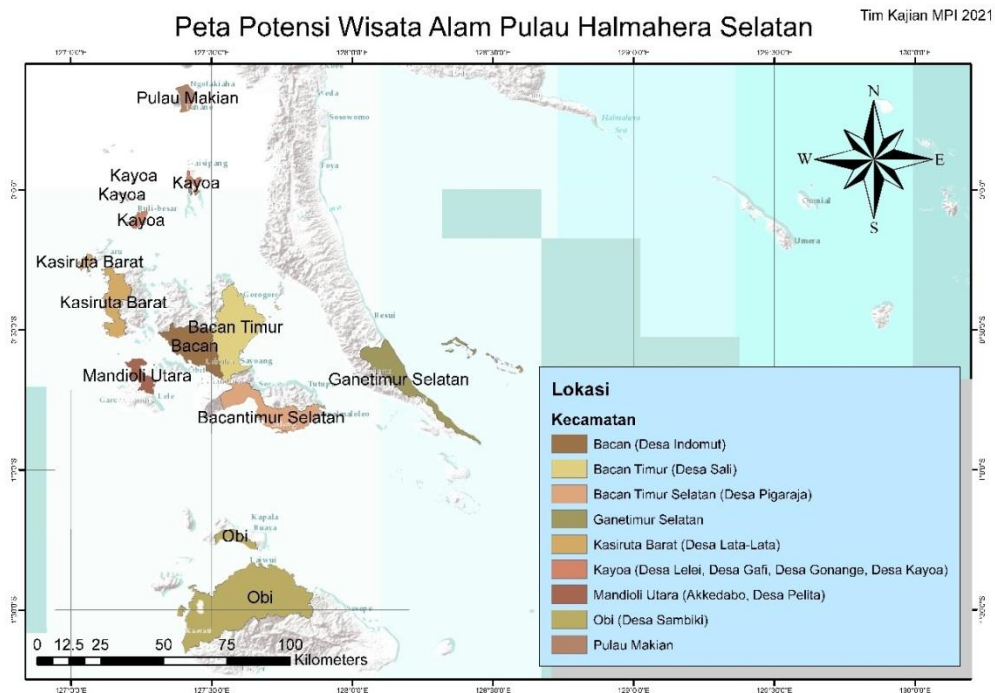
Seluruh potensi di Halmahera Selatan dapat mendorong tiga segmen wisata yaitu warisan budaya khususnya sebagai wilayah kesultanan, alam, dan agrotourism. Kendati demikian, wilayah Halmahera Selatan memiliki infrastruktur dasar yang belum cukup memadai. Kelemahan utama kelayakan kegiatan agrotourism adalah kurangnya akses yang mudah. Jalan akses utama belum seluruhnya mencapai wilayah potensial. Kurangnya infrastruktur mengisyaratkan perlunya koordinasi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan, baik dari sektor publik maupun swasta, sekaligus membenahi peraturan dan undang-undang guna memberi keleluasaan bagi industri agrotourism memperoleh manfaat dari pembangunan dan penanaman modal, peluang yang dapat diberikan oleh industri pariwisata yang kuat. Keanekaragaman daya tarik merupakan motivasi utama bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Fasilitas dan layanan potensial yang disediakan untuk kegiatan terkait wisata juga bermanfaat bagi penduduk setempat, sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup di wilayah Halmahera Selatan.



Gambar 1. Peta Wisata Air Terjun/Air Panas (Kiri) Dan Peta Wisata Pantai (Kanan) di Kabupaten Halmahera Selatan (Sumber: Tim Kajian, 2021)



Gambar 2. Peta wisata danau di Kab. Halmahera Selatan (Sumber: Tim Kajian, 2021)



Gambar 3. Peta Wisata Alam Pulau di Kabupaten Halmahera Selatan (Sumber: Tim Kajian, 2021)

Potensi Investasi agritourism Halmahera Selatan dilakukan berdasarkan karakteristik pertanian daerah tersebut serta kriteria umum yang perlu diberlakukan untuk kebutuhan pengembangan Investasi lokal, regional, nasional, dan global. Bisnis agrotourism sangat menarik bagi perekonomian banyak daerah karena pertumbuhannya yang berkelanjutan. Secara khusus, di beberapa daerah seperti Pulau Kayoa, Pulau Bacan, Gane Timur dan beberapa tempat lain terdapat konsentrasi tinggi pertanian maupun potensi wisata alam, sejarah, serta aneka kuliner lokal, sebagaimana informasi pada Tabel berikut yang mendeskripsikan fitur respon pelaku UKM/IKM terhadap antusiasme pengembangan agrotourism.

Tabel 2. Matriks Peran Anggota Keluarga dalam Pengelolaan Agrotourism untuk Mendorong Investasi Daerah  
(Sumber: Tim Kajian, 2021)

Peran yang Dilingkupi Anggota Keluarga dalam Pengelolaan Agrotourism	Persentase
1. Kegiatan manajemen dan koordinasi	11
2. Aktivitas operasional	24
3. Keduanya (1 & 2)	65
4. Total	100

Selain itu, dapat ditegaskan bahwa, mengacu pada keragaman gender keluarga atau bukan keluarga keterlibatan perempuan dalam menjalankan UKM/IKM sedikit mendominasi. Dapat dilihat pada penjelasan Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Matriks Peran Gender dalam Pengelolaan UKM/IKM untuk Mendorong Investasi Agrotourism Daerah  
(Sumber: Tim Kajian, 2021)

Apakah komponen Wanita mendominasi pengelolaan UKM/IKM	Persentase
1. Ya	45
2. Tidak	55
3. Total	100

Untuk menjawab apa faktor kunci keberhasilan potensi Investasi agrotourism Halmahera Selatan yang memungkinkan penciptaan nilai secara berkelanjutan, maka tanggapan pelaku UKM/IKM menggambarkan kunci keberhasilan faktor yang diidentifikasi terintegrasi dalam dimensi keberlanjutan melalui pendekatan partisipatif (Tabel 4).

Tabel 4. Matriks Pengelolaan UKM/IKM sebagai Aktivitas Utama Investasi Agrotourism Daerah  
(Sumber: Tim Kajian, 2021)

Peran yang Dilingkupi Anggota Keluarga dalam Pengelolaan Agrotourism	Persentase
1. Akomodasi	35
2. Kegiatan tambahan (memanen perkebunan, buah-buahan, dll.)	75
3. Camping	20
4. Resto dan Café	41
5. Wisata dan jalur alam	12
6. Kegiatan belajar pertanian	10
7. Lainnya (wisata dan tur berpemandu, belajar system produksi pertanian tropis dan khas Halmahera Selatan	2.0
8. Penjualan hasil pertanian sendiri (tanaman, ternak, ikan)	90

Menganalisis matriks pada tabel di atas, tampak bahwa kegiatan yang paling luas adalah yang terkait dengan penjualan hasil pertanian sendiri (90 persen). Kegiatan tambahan (memanen perkebunan, buah-buahan, dan lain-lain.) sebesar 75 persen. Resto dan kafe 41 persen, Akomodasi 35 persen. Camping 20 persen, dan penjualan hasil pertanian sendiri. Wisata dan jalur alam 12 persen. Kegiatan belajar pertanian 10 persen, dan paling rendah adalah wisata tur, pemandu serta belajar sistem produksi pertanian tropis dan khas Halmahera Selatan sebesar 2,0 persen. Kegiatan yang dianggap sangat relevan dalam agrotourism dalam terutama untuk penciptaan nilai dalam bisnis, diwakili oleh penawaran produk dan layanan pelengkap (produk pertanian, kursus memasak, serta acara budaya, restoran dan kafe).

Terkait kecenderungan masyarakat untuk pengembangan agrotourism secara khusus 27,64 persen menyatakan ketersediaan untuk menangani penawaran produk/layanan pelengkap guna mendukung Investasi agrotourism, sedangkan 8,19 persen menunjukkan dukungan untuk jasa restoran dan cafe. Lebih lanjut, mereka menegaskan kegiatan yang dianggap strategis untuk bisnis agrotourism adalah anggaran dan aksesibilitas serta infrastruktur termasuk energi (87,50 persen). Perspektif keberlanjutan rencana Investasi agrotourism memperlihatkan hubungan yang kuat antara sektor pertanian dan lingkungan alam, penawaran produk pertanian sendiri, wisata alam, memancing, dan jalan setapak, jalan tani, belajar aktivitas pertanian, dan aktivitas tambahan seperti memanen produk perkebunan dan buah-buahan.

Berdasarkan perspektif keberlanjutan kemampuan agrotourism mengoptimalkan biaya dapat dipenuhi terutama dengan memproduksi sendiri bahan baku, melestarikan lingkungan alam (pertanian, dan perikanan) dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Tabel berikut yang menunjukkan bagaimana sebagian besar sampel (58 persen), persentase biaya rata-rata tahunan adalah antara 50 persen dan 70 persen dari omset perusahaan, sedangkan untuk 27 persen, bobot biayanya lebih rendah dari 50 persen, 50 persen omset.



Tabel 5. Matriks Struktur Biaya Agrotourism Dua Tahun Terakhir untuk Mendorong Investasi Daerah  
(Sumber: Tim Kajian, 2021)

Biaya Rata-Rata Tahunan Mewakili Dua Tahun Terakhir	Persentase
1. Omset kurang dari 50 persen	83
2. Omset lebih dari 70 persen	2
3. Omset antara 50 persen dan 60 persen	11
4. Omset antara 60 persen dan 70 persen	4
Total	100

Selanjutnya, analisis komposisi biaya diperdalam. Dari kuesioner, muncul, bagaimana struktur biaya diwakili terutama oleh biaya personel, bahan baku, dan penyusutan aset tetap.

Tabel 6. Perincian biaya Pengelolaan Agrotourism untuk Mendorong Investasi Daerah  
(Sumber: Tim Kajian, 2021)

Persentase Biaya Relatif terhadap Total	Biaya Personil (persen Responden)	Bahan Baku (persen dari Responden)	Depresiasi (persen dari Responden)
0	0	0	0
10	26	15	15
20	22	26	16
30	15	28	15
40	12	14	16
50	15	12	13
60	8	4	12
70	2	2	4
80	0	0	1
Total	100	100	100

Berdasarkan Tabel 6 diatas menunjukkan komposisi struktur biaya ini. Menganalisis data tersebut menunjukkan bahwa: di 63 persen bisnis agrotourism, biaya personel mewakili antara 10 persen dan 20 persen dari total biaya, konfirmasi manajemen keluarga; di 64 persen bisnis agrotourism, biaya bahan baku mewakili antara 20 persen dan 30 persen dari biaya; biaya penyusutan, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya, lebih terdistribusi, menyoroti insiden yang umumnya lebih tinggi.

Tabel 7. Perincian Omzet Rata-Rata Agrotourism untuk Mendorong Investasi Daerah  
(Sumber: Tim Kajian, 2021)

Rata-rata Omzet Agrotourism Selama dua Tahun Terakhir	Persentase
1. Omset kurang dari 50 juta	89
2. Omset lebih dari 100 juta	2
3. Omset antara 50 juta dan 100 juta	9
Total	100

Rincian omzet rata-rata pada tabel di atas mendeskripsikan rata-rata omzet yang dinyatakan oleh pelaku usaha agrotourism. Hal ini mengindikasikan prevalensi usaha kecil yang signifikan, dengan rata-rata omzet dua tahun terakhir (2019-2020) lebih rendah dari 100.000 juta rupiah. Hanya 2 persen dari sampel yang menyatakan omzet lebih tinggi dari 100.000 juta rupiah. Hasil ini menegaskan terbatasnya pengembangan agrotourism dalam hal pendapatan mengalir.

#### IV. Kesimpulan

Dalam upaya menarik investasi secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan arah dan kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah pemerintah membutuhkan Sebuah pedoman investasi sebagai arahan rencana kerja dalam penyusunan pengembangan investasi sektor pariwisata agar berfungsi secara optimal. Potensi Investasi agrotourism Halmahera Selatan dilakukan berdasarkan karakteristik pertanian daerah tersebut serta kriteria umum yang perlu diberlakukan untuk kebutuhan pengembangan Investasi lokal, regional, nasional, dan global. Bisnis agrotourism sangat menarik bagi perekonomian banyak daerah karena pertumbuhannya yang berkelanjutan. Secara khusus, di beberapa daerah seperti Pulau Kayoa, Pulau Bacan, Gane Timur dan beberapa tempat lain terdapat konsentrasi tinggi pertanian maupun potensi wisata alam, sejarah, serta aneka kuliner lokal.

Potensi investasi di sektor pariwisata meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Seluruh potensi di Halmahera Selatan dapat mendorong tiga segmen wisata yaitu warisan budaya khususnya sebagai wilayah kesultanan, alam, dan agrotourism. Kendati demikian, wilayah Halmahera Selatan memiliki infrastruktur dasar yang belum cukup memadai. Kelemahan utama kelayakan kegiatan agrotourism adalah kurangnya akses yang mudah. Fasilitas dan layanan potensial yang disediakan untuk kegiatan terkait wisata juga bermanfaat bagi penduduk setempat, sehingga secara signifikan meningkatkan kualitas hidup di wilayah Halmahera Selatan.

## Daftar Pustaka

- Adji, Sakti. A. 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. "Ekonomi Transportasi". UNHAS, Makassar. Adisasmita, Rahardjo. 2005. "Kawasan Pembangunan Semeja". UNHAS, Makassar.
- Amal, M. Adnan. 2009. "Kepulauan Rempah-Rempah, Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250 – 1950". Gora Pustaka Indonesia, Bursa Kawasan Timur Indonesia. Makassar.
- Armstrong, H and J. Taylor (1993), *Regional Economics and Policy*, Harvester Wheatsheaf, New York.
- Arsyad, L., (1999). *Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara*, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. *Berbagai Tahun Publikasi*. Provinsi Maluku Utara Dalam Angka. BPS Propinsi Maluku Utara. Maluku Utara.
- Barro, R.J. and X. Sala-i-Martin (1995) *Economic Growth*, McGraw-Hill, Inc., New York.
- Bendavid-Val, Avrom. 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practioners*, Praeger Publisher, Fourt Edition, New York and London. Blakeley, Edward J., 1994. *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, Second edition, USA; SAGE Publication Inc.
- Branson, W.H. 1989. *Macroeconomics Theory and Policy*, Harper & Row, Singapore.
- Blakely, E.J., 1994. "Planning Local Economic Development: Theory and Practice" 2nd ed. Sage Publications Inc. Thousands Oaks, California, United States of America.
- Bandarin, F., Hosagrahar, J., & Albernaz, F. S. 2011. "Why development needs culture". *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 1 (1), 15–25.
- Bendavid-Val, Avrom, (1991), *Regional and Local Economic Analysis for Practioners*, Praeger Publisher, Fourt Edition, New York and London.
- Blakeley, Edward J., (1994). *Planning Local Economic Development, Theory and Practice*, Second edition, USA; SAGE Publication Inc.
- Bradley, R. and J.S. Gans (1998) *Growth in Australian Cities*, The Economic Record, Vol. 74, No. 226, The Economic Society of Australia.
- Branson, W.H. (1989) *Macroeconomics Theory and Policy*, Harper & Row, Singapore.
- Booth, A. 2000. "Poverty and Inequality in The Soeharto Era: An Assessment," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 36 (1), pp. 73–104.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Richardson, H., W., (1977). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, (terjemahan Paul Sihotang), Lembaga Penerbitan, FE-UI, Jakarta.
- Sjoholm, F., (1999), *Productivity Growth in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct Foreign Investment*, Economic Development and Culture Change, Vo. 47, No. 3, The University of Chicago Press.
- Soepono, Prasetyo, (2000), "Model Gravitasi sebagai alat pengukur hinterland dari Central Place" *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.15 No. 4, 414-423.
- Sukirno, S., (1985), *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutomo, S., (1995), *Kemiskinan dan Pembangunan Ekonomi Wilayah; Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi*. Disertasi Doktor. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Tarigan, R., (2004). *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.BumiAksara, Jakarta.
- Timmer, C. P. 2004. "The road to pro-poor growth: the Indonesian experience in regional perspective," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 40(2), pp. 177–207.
- Todaro, Michael P., (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.